

PEMBINGKAIAN BERITA PEMBATALAN KUNJUNGAN KEPALA NEGARA KE BELANDA DI SURAT KABAR

**(Studi Analisis Framing terhadap Berita Pembatalan Kunjungan Kepala
Negara ke Belanda di Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

RELITA ATMA HENDRICH
NPM. 0743010211

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SURABAYA
2010**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAKSI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Surat Kabar sebagai Tanggung Jawab Sosial	14
2.1.2 Surat Kabar sebagai Kontrol Sosial	15
2.1.3 Media dan Konstruksi Realitas	17
2.1.4 Ideologi Media	18
2.1.5 Produksi Berita	19
2.1.6 Berita sebagai Hasil Konstruksi Realitas	25
2.1.7 Hubungan antara Media dan Politik	27
2.1.8 Teori Hierarchy of Influence	29
2.1.9 Analisa Framing	36
2.1.10 Model Framing Pan Kosicki	38
2.2 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Metode Penelitian	47
3.2 Definisi Operasional	48

3.2.1 Berita Pembatalan Kunjungan Kepala Negara Ke Belanda..	48
3.2.2 Berita di Surat Kabar Kompas dan Jawa Pos	48
3.3 Subyek dan Objek Penelitian	48
3.4 Unit Analisis	49
3.5 Populasi dan Korpus	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Teknik Analisis Data	51
3.8 Langkah-langkah Analisis Framing	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Jawa Pos dan Kompas	58
4.1.1 Sejarah Perkembangan Jawa Pos	58
4.1.1.1 Sebaran dan Profil Pembaca Jawa Pos	65
4.1.1.2 Kebijakan Redaksional	65
4.1.2 Sejarah Perkembangan Kompas	72
4.1.2.1 Sebaran dan Profil Pembaca Kompas	75
4.1.2.2 Kebijakan Redaksional	79
4.2 Hasil dan Pembahasan	83
4.2.1 Analisis Framing Berita Jawa Pos dan Kompas	84
4.2.1.1 Jawa Pos, edisi 6 Oktober 2010	85
4.2.1.2 Jawa Pos, edisi 7 Oktober 2010	93
4.2.1.3 Jawa Pos, edisi 8 Oktober 2010	98
4.2.1.4 Frame Jawa Pos	104
4.2.1.5 Kompas, edisi 6 Oktober 2010	106
4.2.1.6 Kompas, edisi 7 Oktober 2010	112
4.2.1.7 Kompas, edisi 8 Oktober 2010	117
4.2.1.8 Frame Kompas	123
4.3 Teori Hierarchy of Influence	125
4.4 Frame Jawa Pos dan Kompas	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	135
5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139

ABSTRAKSI

RELITA ATMA HENDRICH, PEMBINGKAIAN BERITA PEMBATALAN KUNJUNGAN KEPALA NEGARA KE BELANDA DI SURAT KABAR (Studi Analisis Framing Berita Pembatalan Kunjungan Kepala Negara ke Belanda di Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas) SKRIPSI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wartawan membingkai dan mengkonstruksi berita-berita mengenai pembatalan kunjungan Kepala Negara ke Belanda secara mendadak. Peneliti berusaha melihat bagaimana Jawa Pos dan Kompas mengemas peristiwa pembatalan kunjungan kenegaraan ini. Analisis *Framing* sebagai metode analisis teks, metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruksionis.

Landasan teori yang digunakan adalah konsep tentang media massa dan konstruksi realitas berita sebagai hasil konstruksi berita dalam paradigma konstruksionis dengan ideologi media massa.

Metode penelitian yang digunakan analisis *Framing* model dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki dalam menganalisa pemberitaan mengenai pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda ini. Dengan menggunakan empat struktur analisis yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Korpus dalam penelitian ini adalah berita-berita yang menjadi laporan utama pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas mengenai berita pembatalan kunjungan negara ke Belanda edisi 6, 7 dan 8 Oktober 2010.

Hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa surat kabar Jawa Pos menekankan frame obyektif, memiliki kecenderungan penekanan pada judul berita. Frame obyektif ini juga terlihat pada kritik yang banyak diulas dalam berita pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda lebih detail dengan menuliskan pendapat dari beragam elite politik. Menampilkan gambar tetapi tidak ada tabel. Sedangkan surat kabar Kompas cenderung positif menanggapi peristiwa pembatalan kunjungan kenegaraan ini. Terlihat pada beritanya yang menyajikan sudut pandang dari semua pihak, baik dari pemerintah Indonesia, Belanda dan RMS, serta pernyataan yang mendukung keputusan Presiden. Kompas mengupasnya dengan menggunakan bahasa wartawan Kompas sendiri untuk memperjelas kutipan narasumber. Terdapat gambar dan tabel berita.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberitaan Jawa Pos memunculkan kejadian yang paling panas untuk dijadikan headline dan tema beritanya. Sedangkan Kompas membentuk berita-berita berdasarkan berbagai sudut pandang. Frame yang terbentuk adalah Jawa Pos dengan Frame obyektif dan Kompas dengan Frame positif.

Keyword : *Framing*, Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Media adalah sebuah sistem komunikasi manusia yang saat ini telah kian penting di dunia. Media telah memainkan peranan penting dalam merombak tatanan sosial menjadi masyarakat serba massal, pengalaman primer telah digantikan oleh komunikasi sekunder, seperti media cetak, televisi, film dan radio (Rivers, 2003:323).

Secara teoritis, media massa bertujuan menyampaikan informasi dengan benar secara efektif dan efisien. Akan tetapi pada prakteknya apa yang disebut sebagai kebenaran ini sangat ditentukan oleh kepentingan survival media itu sendiri, baik dari pengertian politis maupun bisnis. Dalam kaitan ini kerap terjadi bahwa “kebenaran milik perusahaan” – dalam istilah Budi Susanto (1992:62) – menjadi penentu atau acuan untuk kebenaran-kebenaran lainnya. Atas kebenaran milik perusahaan itulah realitas yang ditampilkan media bukan sekedar realitas tertunda, namun juga realitas tersunting. Di belakang realitas tersunting ini terdapat pemilihan atas fakta atau informasi yang dianggap penting dan yang tidak dianggap penting, serta yang dianggap penting namun demi kepentingan survival menjadi tidak perlu disebarluaskan.

Ketika pers menjadi semakin bebas seperti sekarang ini, banyak media cetak lebih mengutamakan berita yang cenderung berbau sensasional. Masalah objektivitas pemberitaanpun menjadi perdebatan klasik dalam studi media. Salah

satu yang mewakili perdebatan dua pandangan – pro dan kontra objektivitas – adalah John C. Meriil dan Everette E. Dennis. Meriil berpendapat jurnalisme objektif, mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan, sampai penyuntingan berita. Nilai-nilai subjektif wartawan ikut mempengaruhi semua proses kerja jurnalistik. Sebaliknya, Dennis mengatakan, jurnalisme objektif bukan sesuatu yang mustahil, karena semua proses kerja jurnalistik pada dasarnya dapat diukur dengan nilai-nilai objektif, misalnya memisahkan fakta dan opini, menghindari pandangan emosional dalam melihat peristiwa dan memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta melihat peristiwa dari dua sisi. Dennis percaya, jurnalisme objektif mungkin jika mengadopsi metode dan prosedur yang dapat membatasi subjektifitas wartawan maupun redaktur (Siahaan, 2001:60-61).

Untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna biasanya sebuah media cetak melakukan penonjolan-penonjolan terhadap suatu berita. Dalam pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2001:163). Hal ini terlihat pada banyaknya media yang akhir-akhir ini memberitakan peristiwa pembatalan kunjungan negara ke Belanda secara mendadak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini dikarenakan akan adanya pergerakan di Den Haag yang mengajukan tuntutan ke pengadilan yang mempersoalkan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang diajukan sejumlah warga Belanda dan organisasi termasuk Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam gugatan tersebut RMS menuntut Presiden Yudhoyono juga ditangkap. Gugatan yang disidangkan di pengadilan Den Haag hari Selasa

kemarin itulah yang membuat Presiden Yudhoyono menjadwalkan ulang untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix. Presiden baru akan berkunjung bila sidang RMS itu berakhir.

Oleh karena itu, Presiden membatalkan kunjungan negara sesaat sebelum keberangkatan. Rencananya, Presiden akan berkunjung ke Belanda untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda tanggal 5-9 Oktober 2010. Dalam Kompas edisi 6 Oktober 2010, Presiden Yudhoyono beranggapan bahwa digelar pengadilan itu adalah sesuatu yang menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

RMS menuntut Presiden Yudhoyono karena melanggar hak-hak asasi manusia di Maluku. Sebanyak 93 orang dipenjara karena mereka berdemonstrasi secara damai bagi Republik Maluku Selatan. Data ini berdasarkan laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch.

Jawa Pos melihat berita pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda ini dari beberapa sudut pandang. Ada berbagai pendapat yang dilontarkan dari dalam pihak Indonesia sendiri maupun dari pihak Belanda. Kebanyakan mengkritik dan menyayangkan keputusan Presiden membatalkan kunjungan Negara di menit-menit akhir sebelum pemberangkatan. Seperti pada Jawa Pos edisi 6 Oktober 2010 :

“Penundaan keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda pada menit-menit terakhir kemarin (5/10) dianggap menampar diri sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana SH LLM PhD.”

Jawa Pos lebih memberikan sudut pandang yang mengkritik pembatalan kunjungan Negara yang dilakukan presiden Yudhoyono secara mendadak. Hal ini menimbulkan beragam pendapat.

Kompas lebih netral dalam menyajikan berita mengenai pembatalan kunjungan Negara ini dengan tidak banyak membahas tentang kritikan yang diserukan, tetapi lebih banyak membahas tentang bagaimana kondisi politik di Indonesia pasca pembatalan kunjungan kenegaraan itu serta hubungan kerja sama antara Indonesia dan Belanda. Selain itu Kompas juga lebih banyak membahas dari pihak Republik Maluku Selatan (RMS) mengenai tuntutan pada Presiden Yudhoyono. Akan tetapi Kompas juga memberikan pandangan berbeda melalui narasumber mengenai pembatalan kunjungan kenegaraan ini. Seperti pada Kompas edisi 7 Oktober 2010 :

“Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menilai, pembatalan kunjungan ke Belanda merupakan langkah yang tepat. Pembatalan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat dilihat sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah Belanda.”

Pembatalan kunjungan ini juga menimbulkan reaksi dan pendapat beragam, apalagi ini menyangkut Republik Maluku Selatan yang telah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Pos edisi 7 Oktober 2010 memuat :

“Sementara itu, pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden SBY diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Belanda agar tidak memberikan ruang gerak kepada kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS).”

Sedangkan Kompas mengutip pernyataan Wakil Direktur Human Rights Working Group Choirul Anam dan Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi pada edisinya 6 Oktober 2010 :

“...Selasa, menilai pembatalan kunjungan Presiden itu adalah tindakan berlebihan. Pembatalan itu justru memberikan ruang kepada RMS dan Presiden buruk. Presiden semestinya tak perlu khawatir soal proses peradilan.”

Pada perkembangan selanjutnya pasca terjadinya pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda, timbul reaksi dari pihak Belanda juga dari pihak Indonesia sendiri. Para tokoh elite politik mengungkapkan beragam pendapat. Hal ini juga menyangkut rencana penjadwalan ulang kunjungan kenegaraan tersebut. Jawa Pos edisi 8 Oktober 2010 memuat penegasan yang diungkapkan oleh Menlu Marty Natalegawa :

“Soal penjadwalan ulang kunjungan ke Belanda, Marty menyebut bergantung pada perkembangan selanjutnya. “Biarkan semua mengalir. Pemerintah Indonesia tidak tergesa-gesa menjadwal ulang kunjungan. Kita biarkan untuk memastikan segala sesuatunya sudah betul-betul diatasi,” ujar Marty.”

Kompas edisi 8 Oktober 2010 juga memuat pendapat yang berbeda dalam menanggapi rencana penjadwalan ulang kunjungan kenegaraan ini :

“Di tempat terpisah, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan agar sesegera mungkin SBY ke Belanda. “Harus segera ke Belanda kalau sudah mendapatkan waktu yang tepat,” kata Jusuf Kalla saat ditemui se usai peresmian Gerai Palang Merah Indonesia di Bekasi, Kamis.”

Adanya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Maluku dan Papua menjadi alasan RMS menuntut agar Presiden Yudhoyono ditangkap setibanya di Belanda. Hal ini bermula ketika RMS bermaksud untuk memisahkan

diri dari Negara Indonesia Timur. Selain itu pengajuan kasus itu berdasarkan penilaian bahwa Presiden Yudhoyono sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya aktivis RMS di Maluku pada Juni 2010. Salah satu contoh peristiwa yang dianggap melanggar HAM adalah pada saat digelarnya upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Yudhoyono, beberapa aktivis RMS menari tarian Cakalele dan tiba-tiba mengibarkan bendera RMS. Aparat mengusir dan berusaha mengamankan penari-penari itu. Beberapa orang yang berusaha kabur dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat.

Isu yang dibentuk dan dikonstruksikan oleh media disini adalah mengenai peristiwa pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda oleh Presiden Yudhoyono. Dengan segala tanggapan dan respon yang diberikan masyarakat akibat peristiwa ini.

Untuk melihat perbedaan media dalam mengungkap suatu peristiwa (realitas) peneliti memilih analisis *framing* sebagai metode penelitian. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2004:224).

Dengan menggunakan analisis *framing*, akan jelas bahwa masing-masing media, baik cetak maupun elektronik, punya “penangkapan” tersendiri tentang berita apa yang perlu ditonjolkan dan dijadikan fokus dan mana yang harus disembunyikan bahkan dihilangkan. Begitu pula dengan bagaimana cara sebuah

isu dituturkan dan ditayangkan, pasti setiap media memiliki *angle*, cara dan gaya masing-masing yang saling berbeda, meskipun perbedaan itu tidak terlalu signifikan terlihat.

Menurut Zhongdang dan Kosicki, *framing* dapat dipelajari sebagai suatu strategi untuk memproses dan mengkonstruksi wacana berita atau sebagai karakteristik wacana itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan Zhongdang dan Kosicki, Robert M. Entman juga menyatakan, *frame* berita muncul pada dua level. Pertama, secara mental menyimpan prinsip-prinsip pemrosesan informasi dan kedua sebagai karakteristik teks berita. *Frame* juga menjelaskan atribut-atribut berita itu sendiri. *Frame* terletak di dalam property spesifik berita naratif yang mengarahkan perasaan dan pemikiran mengenai peristiwa-peristiwa untuk membangun pengertian khusus (Siahaan, 2001:77).

Bahasa adalah unsur utama dalam proses konstruksi realitas. Bahasa merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat narasi atau alat konseptualisasi. Jika dicermati secara teliti, seluruh isi media baik media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal (gambar, foto, gerak-gerik, atau tabel). Penggunaan bahasa tertentu berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahkan bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas (Hamad, 2004:12-14).

Hal ini sejalan dengan pendapat Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang melihat *framing* sebagai cara untuk mengetahui bagaimana suatu media mengemas berita dan mengkonstruksi realitas melalui pemakaian strategis kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca.

Pemilihan isu tergantung pada prioritas masing-masing surat kabar. Mengingat salah satu fungsi media massa adalah sebagai kontrol sosial, wajar jika kemudian berharap kepentingan masyarakat memperoleh perhatian lebih. Apalagi jika melihat dampaknya, terpaan media massa berpotensi mempengaruhi kerangka berfikir dan pendapat publik. Sebaliknya, ketika isu-isu tertentu kurang ditonjolkan media massa, publik akan cenderung ikut “melupakan”-nya. Disinilah posisi media massa memegang peranan penting sebagai mediator masyarakat dan pengambil kebijakan.

Oleh sebab itu, berita mengenai pembatalan kunjungan kenegaraan ke Belanda secara tiba-tiba oleh presiden menjadi topik utama di berbagai media massa. Karena ini adalah peristiwa yang mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepresidenan di Indonesia, dimana seorang presiden membatalkan kunjungan ke luar negeri pada menit-menit terakhir. Masyarakatpun merespon hal ini dengan antusias dengan melontarkan beragam kritik, pendapat dan sikap yang dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh politik, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Berita ini tentunya memiliki nilai jual yang tinggi bagi media massa tak terkecuali media cetak, sehingga pandangan dan

cara berpikir antara individu satu dengan lainnya berbeda pula sesuai dengan konstruksi media massa masing-masing terhadap berita penangkapan tersebut. Disini peneliti memilih surat kabar Jawa Pos dan Kompas sebagai media analisis *framing* mengenai pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda secara tiba-tiba.

Jawa Pos sebagai koran yang menyatakan ideologi pasar atau ideologi oplah maka Jawa Pos memiliki idealisme dalam penerbitannya (Suwardi, 2004:153). Jawa Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur dan terbesar kedua di Indonesia, dengan sirkulasi sekitar 350.000 eksemplar setiap harinya. Sedangkan harian Kompas merupakan surat kabar yang terkenal dan netral serta objektif dalam menuliskan beritanya (Flourney dalam sugihari, 2002:17). Selain itu Kompas merupakan harian yang memiliki gaya cenderung “tertutup” dan bersahaja dalam menggambarkan realitas yang terjadi pada masyarakat. Kompas juga memiliki reputasi dalam analisis dan gaya penulisan yang rapi. Harian Kompas sangat diakui keberadaannya di Indonesia dan tegas menulis realitas. Kompas termasuk media yang menganut *system both side cover* menyajikan dua sisi yang berbeda (Oetama, 2001:121). Kompas merupakan pers nasional yang mempunyai visi dalam keredaksionalnya yaitu manusia dan kemanusiaan, sehingga harian ini berusaha untuk senantiasa peka akan nasib manusia dan mengingatkan yang mapan (Oetama, 2001:147).

Perbedaan harian Jawa Pos dengan Kompas dalam mengkonstruksi atau membingkai berita dikarenakan adanya perbedaan cara pandang wartawan, perbedaan visi dan misi, serta perbedaan kebijakan redaksi dari masing-masing

media. Pada dasarnya, kebijakan redaksilah yang menentukan berita mana yang layak dijadikan headline dalam sebuah surat kabar. Kebijakan ini ditentukan oleh dewan redaksi yang terdiri dari unsur-unsur direksi, redaktur, pemasaran, iklan dan sebagainya. Kecenderungan yang muncul tersebut bisa dikarenakan dua hal. Pertama, banyak media pers ter subordinasi ideologi-ideologi ekonomi tertentu meski bukan organisasi politik atau pemerintah., sehingga tidak independen lagi. Kedua, adanya pertumbuhan redaksi. Kebijakan redaksional sangat mempengaruhi bentuk dan jenis pemberitaan yang dimuat dalam suatu media. Redaksi mempunyai hak menyortir suatu berita yang layak siar atau layak cetak. Jika orang-orang yang duduk di redaksi mempunyai suatu ideologi tertentu, secara otomatis berita yang dihasilkan pun juga sesuai dengan keinginan redaksi (Pareno, 2003:92).

Hal ini tampak pada *headline* kedua media tersebut. Jika harian Kompas edisi 6 Oktober 2010 memberi judul “Presiden Batal ke Belanda”, sedangkan *headline* harian Jawa Pos pada edisi yang sama memberi judul “SBY Tak Berani ke Belanda”.

Selain itu tampak pada harian Kompas edisi 8 Oktober 2010, yang tidak menampilkan berita pembatalan kunjungan Negara ke Belanda pada halaman utama tapi justru meletakkannya di halaman politik. Padahal pada surat kabar Jawa Pos edisi 6, 7 dan 8 Oktober selalu meletakkan berita itu di halaman utama. Jika dilihat dengan seksama, *headline* Kompas pada edisi 8 Oktober 2010 tersebut memuat tentang kemacetan di Jakarta. Akan tetapi Jawa Pos justru menampilkan berita tentang kedatangan Miss Universe ke Indonesia serta pemilihan Puteri

Indonesia sebagai headline pada edisi 7 dan 8 Oktober 2010. Disini tampak kepentingan dan ideologi redaksional mempengaruhi penyajian produk berita yang menaungi media massa masing-masing.

Harian Kompas dan Jawa Pos juga menambahkan tabel dan foto dalam setiap beritanya mengenai pembatalan kunjungan Kepala Negara ke Belanda selama ini sehingga masyarakat bisa menelaah informasi dengan lebih mudah dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada.

Tema-tema penulisan judul serta pemakaian kata atau kalimat yang dipakai oleh Kompas dan Jawa Pos memiliki perbedaan yang bisa menimbulkan makna konotasi dan denotasi. Harian Kompas menyajikan berita pembatalan kunjungan negara ini cenderung menggunakan kata-kata atau kalimat yang lebih bersahaja dan tidak mempunyai makna konotasi yang buruk. Sedangkan Jawa Pos terkadang menggunakan kata-kata atau kalimat yang lebih berani seperti pada *headline* Jawa Pos edisi 6 Oktober 2010, contohnya : “*Presiden Tak Berani ke Belanda*”.

Media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin realitas. Media yang kita lihat, justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus terlihat bagaimana peristiwa yang sama diberlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada yang menganggap penting, ada yang tidak menganggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa subjektifnya media. Mengetengahkan perbedaan semacam ini tentu

bukan menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca setiap hari telah melalui proses rekonstruksi.

Dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud meneliti bagaimana media cetak melakukan konstruksi atau pembingkaihan realitas pemberitaan tentang pembatalan kunjungan Kepala Negara ke Belanda. Adapun media yang digunakan adalah harian Kompas dan Jawa Pos edisi 6, 7 dan 8 Oktober 2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana pembingkaihan berita Pembatalan Kunjungan Kepala Negara ke Belanda pada Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas edisi 6, 7 dan 8 Oktober 2010”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

“Mengetahui pembingkaihan berita Pembatalan Kunjungan Kepala Negara ke Belanda pada Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas edisi 6, 7 dan 8 Oktober 2010”.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan ciri ilmiah pada sebuah penelitian ilmiah dengan mengaplikasikan teori-teori khususnya teori komunikasi tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis framing.

1.4.2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sudut pandang baru dalam menilai objektivitas pemberitaan.